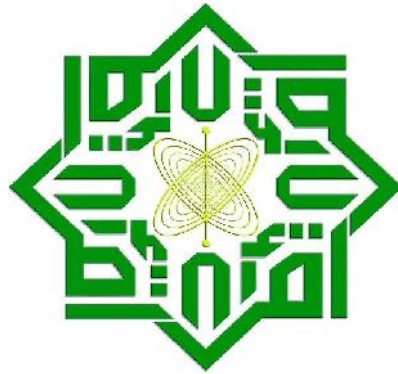


**PEMANFAATAN DANA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
MANDIRI SEJAHTERA(JKSMS) DALAM MENINGKATKAN
USAHA PEDAGANG DI KECAMATAN MERBAU
MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE.Sy)
Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum



DISUSUN OLEH:

TENGKU ERNAWATI
10825003496

PROGRAM :STRATA SATU (S1)

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

ABSTRAK

Adapun skripsi ini berjudul: **“Pemanfaatan Dana Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera (KJKS-MS) dalam Meningkatkan Usaha Pedagang di Kecamatan Merbau Menurut Ekonomi Islam”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemanfaatan dana koperasi jasa keuangan syari’ah mandiri sejahtera oleh pedagang di Kecamatan Merbau, hasil pemanfaatan dana koperasi jasa keuangan syari’ah mandiri sejahtera dalam meningkatkan usaha pedagang, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemanfaatan dana koperasi jasa keuangan syari’ah mandiri sejahtera dalam meningkatkan usaha pedagang.

Adapun lokasi penelitian di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera yang berada di Jl. Kamboja No16 Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Dengan jumlah populasi 298 orang dan sebagai sampel 53 orang responden. Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer yang di peroleh langsung dari pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera dan masyarakat pengguna dana Koperasi Jasa Keuangan Syaria’ah Mandiri Sejahtera di Kecamatan Merbau dan data sekunder diperoleh dari perpustakaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan angket. Metode analisa data deskriptif kualitatif yaitu dimana data terkumpul, kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian. Metode penulisan adalah deduktif dan deskriptif. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dana Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera oleh pedagang di Kecamatan Merbau, untuk mengetahui hasil pemanfaatan dana Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah dalam meningkatkan usaha pedagang dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pemanfaatan dana Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera.

Sedangkan kesimpulan bahwa pemanfaatan dana Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera sudah berdampak positif karena masyarakat atau anggota Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera menggunakan dana pembiayaan untuk usaha produktif sesuai dengan akad yang diajukan dalam pembiayaan, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat memanfaatkan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan akad pada awal pembiayaan yaitu digunakan untuk kebutuhan konsumtif, Sedangkan hasil pemanfaatan dana KJKS-MS dalam meningkatkan usaha pedagang sudah mengalami peningkatan karena setiap anggota yang dibiayai dilakukan pengawasan oleh pihak KJKS-MS terhadap usaha yang dijalani agar dana pembiayaan tersebut digunakan untuk kebutuhan produktif dan tepat guna, dan Tinjauan ekonomi Islam terhadap pemanfaatan dana KJKS-MS sudah sejalan dan sesuai dengan syari’at.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan cahaya Iman dan Ilmu pengetahuan.

Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru dengan Judul “ *Pemanfaatan Dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera (KJKSMS) Dalam Meningkatkan Usaha Pedagang Di Kecamatan Merbau Menurut Ekonomi Islam*”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari dukungan dan bantuan yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan kepada penulis terutama kepada orang tua penulis tercinta Ayahanda Tengku Hamzah dan Ibunda Asinah yang telah banyak berkorban baik moril maupun materil dan memberikan do'a restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan. Serta pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru beserta staf-stafnya.
2. Dr. H.Akbarizan, M.A,M.Pd selaku Dekan beserta PD I, PD II dan PD III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

3. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si dan Sekretaris Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.
4. Bapak Drs.H.Mohd Nasir Cholis, MA selaku pembimbing penulis yang telah banyak menuangkan waktu dan tak pernah bosan arahan kepada penulis.
5. Bapak Jonius, SE selaku Penasehat Akademis.
6. Bapak perpustakaan UIN SUSKA Pekanbaru serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen Khususnya pak Amrul dan Karyawan/i UIN Suska khususnya Fakultas Syaria'h dan Ilmu Hukum.
8. Bapak Drs.Asrorudin.Msi, selaku camat yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Merbau.
9. Bapak Burhanuddin, selaku Manajer KJKS-MS beserta Staf-stafnya yang telah memberikan petunjuk serta kemudahan dalam melakukan penelitian.
10. Saudara –saudaraku yang tercinta Tengku Azhar (Abang) Tengku Azizah (Kakak) Muhammad Aidil Sapuetra (Adik), yang telah memberikan dukungan dan semangat serta penuh pengorbanan menjelang selesainya skripsi ini dan memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik.
11. Rekan-rekan Mahasiswa/i Fakultas Syaria'h khususnya Jurusan Ekonomi Islam angkatan tahun 2008 EI/3 yang telah memberikan pengalaman dan pengajaran hidup semasa kuliah semoga kalian termotivasi untuk menyelesaikan kuliahnya.

12. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan yang anda tuangkan dalam roda kehidupan.

Selain itu semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan tangan terbuka. Mudah-mudahan semua bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari ALLAH SWT, *Amin ya Rabbal' Alamin*.

Pekanbaru, 26 Desember 2012

Penulis

TENGKU ERNAWATI
NIM. 10825003496

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. RumusanMasalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Kecamatan Merbau	14
B. Profil Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera.....	21
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penggunaan Dana.....	35
B. Pengertian Koperasi	39
C. Prinsip,Fungsidan Peran Koperasi	42
D. Landasan dan Asas Koperasi	45
E. Persyaratan Pembentukan Koperasi dan Jenis Koperasi...	48
F. Jenis Koperasi	49
G. Koperasi dalam Pandangan Islam	52
H. Pengertian Pembiayaan	55
I. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	57
J. Unsur-Unsur Pembiayaan	58
K. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	60
BAB IV : DANA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH MANDIRI SEJAHTERA DAN PENINGKATAN USAHA PEDAGANG	
A. Pemanfatan Dana Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera Oleh Pedagang Di Kecamatan Merbau....	64

B. Hasil Pemanfatan Dana Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera dalam Meningkatkan Usaha Pedagang	73
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera dalam Meningkatkan Usaha Pedagang	79

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 :	Jumlah Penduduk Kecamatan Merbau Berdasarkan Desa/Kelurahan	16
Tabel II.2 :	Klasifikasi Penduduk Kecamatan Merbau Menurut Agama Dan Kepercayaan.....	18
Tabel II.3 :	Klasifikasi Penduduk Kecamatan Merbau Menurut Tingkat Pendidikan.....	19
Tabel II.4 :	Prasarana Pendidikan Umum (Negeri) Di Kecamatan Merbau.....	20
Tabel IV.5 :	Alternatif Jawaban Responden Mengenai Faktor Yang Mendorong Mengajukan Pembiayaan Ke KJKS-MS	66
Tabel IV.6 :	Alternatif Jawaban Responden Mengenai Apakah Seluruh Modal Bersumber Dari KJKS-MS	67
Tabel IV.7 :	Alternatif Jawaban Responden Mengenai Usaha Yang di Tekuni Setelah Mendapat Pembiayaan	68
Tabel IV.8 :	Alternatif Jawaban Responden Mengenai Prosedur Pembiayaan Pada KJKS-MS	69
Tabel IV.9 :	Alternatif Jawaban Responden Mengenai Pemanfaatan Dana Pembiayaan Dari KJKS-MS	70
Tabel IV.10 :	Alternatif Jawaban Responden Tentang Keuntungan/Bagi Hasil Yang Diambil KJKS-MS	71
Tabel IV.11 :	Alternatif Jawaban Responden Mengenai Sistem Pembayaran Dana Pembiayaan	72
Tabel IV.12 :	Alternatif Jawaban Responden Mengenai Apakah Ada Pengawasan Dari Pihak KJKS-MS Terhadap Biaya Yang Diberikan Untuk Usaha	74
Tabel IV.13 :	Alternatif Jawaban Responden Mengenai Perlu Adanya Bimbingan/Pelatihan Untuk Para Pembiayaan.....	75
Tabel IV.14 :	Alternatif Jawaban Responden Mengenai Apakah Omset Berkembang Setelah Mendapat Pembiayaan	76

Tabel IV.15 : Alternatif Jawaban Responden Mengenai Jumlah Pelanggan Setelah Mendapat Pembiayaan	77
Tabel IV.16 : Alternatif Jawaban Responden Mengenai Pendapatan Setelah Mendapat Pembiayaan	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ekonomi hanya melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang dilakukan masih sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman populasi manusia mengalami pertumbuhan. Sehingga kegiatan ekonomi juga mengalami perkembangan.¹

Di Indonesia, perdebatan tentang masalah konsep ekonomi kerakyatan terus berlansung. Banyak pihak yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan sebagai dasar pijakan pembangunan kedepan akan mengakibatkan pertumbuhan akan menjadi lamban. Namun hal ini langsung di bantah oleh sebagian pengamat yang justru menilai, demi kesejahteraan bangsa Indonesia kedepan yang lebih tepat adalah membangun kembali perekonomian rakyat, kita semestinya menempatkan sektor ekonomi rakyat sebagai Soko Guru ekonomi nasional.

Di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1, mengungkapkan bahwa: “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan”. Dalam pasal ini tercantum dasar kepada masyarakat yang harus memegang peranan aktif dalam pembangunan perekonomian, berbagai cara telah digunakan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, bahwa jika pada semulanya dalam pemecahan

¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet. Ke-1, hlm.107

kebutuhan hidupnya, manusia melakukannya secara individual, maka dalam perkembangan nya cara pemecahan masalah tentang pemenuhan kebutuhan hidupnya itu manusia berusaha melakukannya secara bersama-sama dan dalam perkembangan yang lebih lanjut, untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi itu berbeda-beda, seiring dengan berkembangnya zaman.²

Secara kenyataan bahwa rakyat Indonesia dipelosok-pelosok Tanah Air yang tinggal dikota, dari dulu hingga sekarang adalah merupakan rakyat yang mampu memproduksi, tetapi secara kenyataan pula hanya sebagian kecil yang mampu mengembangkan produksinya, sedangkan sebagian terbesar hanya merupakan usahawan-usahawan perorangan yang sulit mengembangkan usahanya dan tetap hidup di bawah kemiskinan, karena modal yang mereka miliki sangat terbatas, serta pengetahuan ekonomi sangat terbatas.

Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam hal ini bahwa kemakmuran masyarakat yang lebih diutamakan bukan kemakmuran perseorangan atau dapat ketahui bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota, terwujudnya peningkatan pendapatan para anggotanya, dan dalam

² Drs. Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Glora Erlangga, 2001), Cet. ke-1, hlm. 128

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Lagesindo, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 85

meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

Shirkah ta'awuniah tidak mengandung unsur *mudharabah* yaitu (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Modal usaha *syirkah ta'awuniah* adalah sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan.⁵

Untuk mencapai tujuan terciptanya kesejahteraan, pemerintah Indonesia menggalakkan pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan yang di sebut juga dengan koperasi. Salah satu pembangunan ekonomi kerakyatan tersebut adalah koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera khususnya di Kecamatan Merbau.

Masyarakat mengharapkan dengan adanya badan usaha perekonomian KJKSMS (**Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera**) yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpan pinjam sesuai pola syari'ah yang disebut dengan istilah KJKS Mandiri Sejahtera akan dapat membantu para pedagang untuk meringankan beban hidup dan dapat meningkatkan pendapatan sehari-hari, serta mengurangi kesulitan masyarakat yang kesehariaanya menghabiskan waktu untuk jual beli (berdagang). Terutama dalam meningkatkan pendapatan /penghasilan dan mensejahterakan usaha pedagang di Kecamatan Merbau.

Sebelum berdirinya koperasi ini di mana mereka dalam mengembangkan usaha dagangan mereka sering mengalami kesulitan untuk

⁵ G. Kartasa Sapoeetra, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), Cet. Ke-7, hlm.27

meningkatkan usahanya. Selama ini walaupun ada yang memberikan pinjaman modal kepada mereka tetapi bunga pinjaman tersebut terlalu tinggi sehingga sulit membayar atau melunasinya. Oleh karena itu koperasi, (JKSMS) yang berdiri sejak tahun (2007) ini yang tiap tahunnya mengalami peningkatan modal baik secara intern dan ekstren sampai saat ini modal usaha sebesar Rp. 250.000.000,00 yang tersedia untuk memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yang membutuhkan modal tersebut.⁶

Sampai saat ini anggota koperasi tersebut menampung sebanyak 295 orang baik yang aktif maupun tidak aktif.⁷

Hal ini terbukti dari studi pengamatan penulis dilapangan menemukan informasi dari salah seorang anggota (KJKSMS), bahwa sebelum ia menjadi anggota koperasi modal untuk usaha berdagang hanya memiliki dibawah 1.000.000,-dan keuntungan bersih yang diperoleh perbulan tidak seberapa yaitu berkisar 20-30% dari jumlah yang ada, yakni lebih kurang Rp.200.000,- s/d Rp. 300.000,-. Namun setelah lebih kurang 3 tahun menjadi anggota koperasi dan telah meminjam dana koperasi tiga kali pinjaman, setiap kali pinjaman mendapatkan modal tambahan dari koperasi dua kali lipat dari simpanannya. Maka modal usaha yang diperoleh semakin besar bahkan tiga kali dari modal sebelumnya, tentunya keuntungan yang diperoleh setiap bulannya tiga kali dari jumlah keuntungan sebelumnya.⁸

⁶ Burhanuddin, (Manager Koperasi JKSMS), *Wawancara*, Teluk Belitung, Senin 19 Maret 2012.

⁷ Mawar, (Staf Koperasi JKSMS), *Wawancara*, Teluk Belitung, Senin 19 Maret 2012.

⁸ Mahintan, (Anggota Koperasi JKSMS), *Wawancara*, Teluk Belitung, Selasa 20 Maret 2012.

Disamping memberikan pinjaman kredit sebagai modal tambahan bagi anggota, pengurus juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota yang diberikan pinjaman agar dana yang telah dipinjamkan betul-betul dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan tepat guna.

Ketika ia meminjam pun koperasi meminta jasa pinjaman kepadanya, akan tetapi pada akhir tutup buku tahunan kerja koperasi, uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota setelah disusut dengan biaya-biaya kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun kerja. Semakin sering ia meminjam modal ke koperasi maka semakin besar pula sisa hasil usaha (SHU) dari koperasi yang ia peroleh. dan tentunya semakin berpengaruh terhadap peningkatan usaha. Dengan demikian sudah semestinya para anggota koperasi yang usaha keseharian sebagai pedagang kecilan (mikro) akan dapat meningkatkan usaha dagangannya dan dapat pula mensejahterakan kehidupan mereka sehari-hari, minimal ada perubahan dalam menambahkan penghasilannya dari jumlah dan jenis dagangannya.

Sehingga barulah dapat dikatakan peningkatan usaha pedagang. Akan tetapi dari hasil penelitian sementara sebagai studi pendahuluan, penulis melihat bahwa dana yang dipinjamkan kurang karena adanya masalah dalam penyaluran kredit simpan pinjam kepada anggotanya.

Hal ini terbukti dengan gejala yang ditemukan penulis di lapangan, diantaranya masih ada anggota yang usahanya yang masih belum jelas, masih ada anggota yang tidak jujur, masih terdapat anggota yang meminjam dana tidak dapat membayar tunggakannya kepada koperasi pada saat jatuh tempo

yang telah disepakati bersama, selain itu anggota koperasi juga mendapat teguran dari pengurus koperasi dan akan dituntut kepengadilan.

Berdasarkan gejala yang terjadi diatas, penulis tertarik terhadap permasalahan yang terjadi dan penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi dengan mengadakan penelitian secara ilmiah berupa skripsi dengan judul: **PEMANFATAAN DANA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH MANDIRI SEJAHTERA (KJKSMS) DALAM MENINGKATKAN USAHA PEDAGANG DI KECAMATAN MERBAU MENURUT EKONOMI ISLAM**".

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, dana dan waktu yang tersedia, maka dalam penulisan ini penulis membatasi yang diteliti adalah Pemanfaatan Dana Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera (KJKSMS) Dalam Meningkatkan Usaha Pedagang di Kecamatan Merbau Menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemanfaatan dana koperasi jasa keuangan Syari'ah mandiri sejahtera oleh pedagang di Kecamatan Merbau?
- b. Bagaimana hasil pemanfaatan dana koperasi jasa keuangan syari'ah mandiri sejahtera dalam meningkatkan usaha pedagang?

- c. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemanfaatan dana koperasi jasa keuangan syari'ah mandiri sejahtera dalam meningkatkan usaha pedagang?

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana koperasi jasa keuangan syari'ah mandiri sejahtera oleh pedagang di Kecamatan Merbau?
- b. Untuk mengetahui bagaimana hasil pemanfaatan dana koperasi jasa keuangan syari'ah Mandiri Sejahtera dalam meningkatkan usaha pedagang ?
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap pemanfaatan dana koperasi jasa keuangan syari'ah Mandiri Sejahtera dalam meningkatkan usaha pedagang?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana masyarakat terbantu dalam pemanfaatan dana KJKSMS dalam meningkatkan usaha pedagang.
- b. Sebagai bahan kajian serta informasi bagi penulis yang berkaitan dengan pemanfaatan dana koperasi (JKSMS) dalam meningkatkan usaha pedagang.

- c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada koperasi (JKSMS) yang berada di Jl. Kamboja No 16 Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. di Pilihnya KJKSMS ini sebagai tempat penelitian karena penulis melihat banyaknya pedagang di Kecamatan Merbau itu terbantu oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera dalam meningkatkan usahanya.

2. Subjek dan Objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang yang menjadi anggota KJKSMS sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana masyarakat terbantu dalam pemanfaatan dana koperasi JKSMS oleh pedagang di Kecamatan Merbau.

3. Populasi dan sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dan para pedagang yang menjadi anggota koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera yang berjumlah 298 orang. Dari populasi yang ada maka penulis mengambil sample sebanyak 53 orang, yang terdiri dari 3 orang pengurus dan 50 orang anggota dengan

menggunakan metode *Random Sampling*. Random sampling adalah salah satu metode penarikan sample yang dilakukan dengan cara acak dan sederhana.

4. Sumber data

- a. Data Primer: data yang diperoleh langsung dari pengurus koperasi dan masyarakat pengguna dana koperasi JKSMS di Kecamatan Merbau beserta anggota koperasi.
- b. Data Sekunder : data yang diperoleh dari pemuka-pemuka masyarakat serta arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan nara sumber yang terdiri ketua, karyawan, serta pedagang yang telah menjadi anggota dan telah meminjam dana kepada koperasi JKSMS atau responden untuk memperoleh informasi sesuai data yang diperlukan.

c. Angket

Penulis membuat pertanyaan berupa angket yang diberikan kepada responden yang telah ditentukan yang akan dijadikan data primer.

6. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Maka analisa data yang penulis gunakan adalah data deskriptif kualitatif, yaitu dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif : yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus
- b. Induktif : yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus. dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum. Setelah semua data terhimpun maka penulis melakukan analisa terhadap data tersebut dengan mengemukakan fenomena yang bersifat khusus kemudian diteruskan kepada fenomena yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan.
- c. Deskriptif : dengan cara menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami serta jelas kesimpulan akhirnya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya yang terdiri dari lima bab. masing-masing bab diperinci lagi menjadi beberapa sub yang saling berhubungan antara satu sama yang lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang: Porfil Kecamatan Merbau, dan Gambaran umum tentang koperasi (JKSMS) di Kecamatan Mebau yang terdiri dari: Sejarah singkat KJKSMS, Visi dan Misi KJKSMS, Struktur organisasi, Kondisi keanggotaan, dan Jenis-jenis Produk dan Jenis-jenis usaha.

BAB III : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari: Penggunaan dana, Pengertian Koperasi, Prinsip Koperasi, Fungsi dan Peran Koperasi, Landasan dan Azas Koperasi, Persyaratan Pembentukan Koperasi dan Jenis Koperasi, Koperasi Dalam pandangan Islam, Pengertian Pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, Unsur-unsur Pembiayaan, dan Prinsip-prinsip Pembiayaan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdiri dari: Pemanfaatan dana koperasi jasa keuangan syari'ah mandiri sejahtera oleh pedagang di Kecamatan Merbau, Hasil pemanfaatan dana koperasi jasa keuangan syari'ah mandiri sejahtera dalam meningkatkan usaha pedagang, dan Tinjauan ekonomi Islam terhadap pemanfaatan dana koperasi jasa keuangan syari'ah mandiri sejahtera dalam meningkatkan usaha pedagang.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. PROFIL KECAMATAN MERBAU

1. Geografi dan Demografi

Sebelum Indonesia merdeka Kecamatan Merbau berada dalam lingkungan pemerintahan kerajaan siak yang berdiri sampai dengan tahun 1942. Kecamatan Merbau pada masa itu disebut distrik merbau dengan ibu negaranya Teluk Belitung dibawah Onder Distrik Tebing Tinggi, permulaan Kemerdekaan Republik Indonesia Distrik Merbau menjadi Kecamatan Merbau dibawah kedewasaan Selat Panjang.

Berdasarkan Undang-undang No.12 tahun 1956 lahirlah Kabupaten Bengkalis yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatra Tengah dan setelah Provinsi Sumatra Tengah dipecah menjadi 3 Provinsi yaitu Sumatra Barat, Jambi dan Riau. Maka lahirlah Provinsi Riau, sejak lahirnya Kabupaten Bengkalis maka Kecamatan Merbau lepas dari kedewasaan Selat Panjang langsung dibawah Kabupaten Bengkalis.⁹

Kecamatan Merbau terletak diantara pulau Sumatra dengan pulau Bengkalis dan selat Melaka dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan pulau Bengkalis
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tebing Tinggi Barat

⁹ Sumber data: kantor kecamatan merbau tahun 2011

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan pulau Merbau dan Kecamatan Rangsang Barat.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Kecamatan Merbau terletak dipulau Padang, letak geografis berada dibagian Timur pulau Sumatra yang terletak diantara $01^{\circ} 03.575'$ Lintang Utara - $102.280'$ Bujur Timur yang merupakan daerah yang beriklim tropis, dengan jumlah desa sebanyak 13 desa dan 1 Kecamatan Merbau ± 96.391 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 16.314 jiwa dengan jumlah 8.018 KK 68 RW 189 RT dan 48 dusun sebagai berikut:

No	Desa/Kelurahan	Luas (KM)	RW	RT	Dusun	Keterangan
1	Kelurahan Teluk Belitung	52	5	23	-	
2	Meranti bunting	20	4	9	4	
3	Lukit	218	4	9	3	
4	Bagan Melibur	62.91	4	14	5	
5	Mengkirau	76	6	15	3	
6	Mengkopot	77	5	14	3	
7	Selat Akar	50	5	12	3	
8	Bandul	24	9	19	3	
9	Kudap	64	8	16	4	
10	Dedap	110	8	11	3	
11	Tanjung Padang	150	6	15	6	
12	Pelantai	21	4	18	4	
13	Tanjung Kulim	10	3	6	3	
14	Mekar Sari	29	4	8	4	
Jumlah		963.91	75	189	48	

Sumber data: *Monografi Kecamatan Merbau Tahun 2011*

Wilayah Kecamatan Merbau juga terdapat beberapa buah sungai dan selat yaitu: selat akar yang terletak antara desa selat akar dan desa bandul dan juga selat rengit yang memisahkan pulau merbau kecamatan

merbau dengan pulau Tebing Tinggi. Musim trofis dengan musim kemarau berkisar pada bulan januari s/d bulan agustus dan musim penghujan berkisar pada bulan September s/d Desember dengan curah hujan 91 hari s/d 118 sebanyak 1.200 MM s/d MM pertahun.

Penduduk merbau sebagian besar merupakan penduduk asli yang sudah turun temurun menetap di Kecamatan Merbau. Menurut monografi tahun 2011 penduduk berjumlah 32.369 jiwa yang terdiri dari masyarakat tempatan dan masyarakat pendatang untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel II.1 dibawah ini:

Tabel II.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Merbau Berdasarkan Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Keterangan
1	Kelurahan Teluk Belitung	5223 Jiwa	1195	
2	Meranti bunting	1347 Jiwa	356	
3	Lukit	1671 Jiwa	502	
4	Bagan Melibur	2954 Jiwa	740	
5	Mengkirau	2139 Jiwa	551	
6	Mengkopot	2245 Jiwa	580	
7	Selat Akar	2400 Jiwa	572	
8	Bandul	3359 Jiwa	812	
9	Kudap	2576 Jiwa	560	
10	Tanjung Padang	2214 Jiwa	545	
11	Pelantai	2196 Jiwa	488	
12	Tanjung Kulim	737 Jiwa	183	
13	Dedap	2695 Jiwa	638	
14	Mekar Sari	1530 Jiwa	296	
Jumlah		32.369 Jiwa	8018	

Sumber data: *Monografi Kecamatan Merbau tahun 2011*

Dari jumlah penduduk diatas tergambar bahwa desa Teluk Belitung merupakan penduduk yang terbanyak dibandingkan dengan 13 desa lainnya yaitu sebanyak 5223 Jiwa.

2. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, karena kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, agama bagi manusia merupakan kebutuhan fitrah yang sangat penting untuk dipenuhi, dengan agama manusia dapat merasakan nikmatnya kehidupan. Karena tanpa agama manusia terombang ambing oleh kehidupan tanpa tujuan. Agama merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat nantinya dan agama dapat juga dijadikan petunjuk dan kebutuhan didalam kehidupan manusia.

Penduduk Kecamatan Merbau mayoritas beragama Islam, hanya sebagian kecil saja yang beragama Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.2 dibawah ini:

Tabel II.2

Klasifikasi Penduduk Kecamatan Merbau Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Des/Kel	Penduduk Menurut Agama				
		Islam	Khatolik	Protestan	Hindu	Budha
1	Teluk Belitung	4244	34	54	60	800
2	Meranti bunting	1347	-	-	-	-
3	Lukit	1631	10	-	-	30
4	Bagan Melibur	2923	6	-	-	25
5	Mengkirau	2139	-	-	-	-
6	Mengkopot	2190	20	-	-	35
7	Selat Akar	-	-	-	-	2400
8	Bandul	3157	40	-	65	97
9	Kudap	2576	-	-	-	-
10	Dedap	2695	-	-	-	-
11	Tanjung Padang	2214	-	-	-	-
12	Pelantai	2196	-	-	-	-
13	Tanjung Kulim	734	-	-	-	-
14	Mekar Sari	1530	-	-	-	-
Jumlah		29.579	110	54	125	3418

Sumber data: *Monografi Kecamatan Merbau tahun 2011*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat merbau yaitu sebanyak 29.579 jiwa.

3. Pendidikan

Penduduk Kecamatan Merbau pada umumnya sudah mengerti akan pentingnya pendidikan, pendidikan merupakan salah satu yang mutlak harus diterima oleh setiap masyarakat diKecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, karena pendidikan merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sikap yang beranggapan tidak pentingnya pendidikan sudah ditinggalkan oleh penduduk Kecamatan Merbau, dengan kesadaran yang mereka tunjukkan dapat memudahkan tugas pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan wajib belajar bagi anak-anak yang berada dalam usia sekolah. Penduduk Kecamatan Merbau yang berjumlah 32.369 jiwa sebagian besar berpendidikan SD,SLTP,SLTA dan sebagian kecil saja yang sampai keperguruan tinggi. Untuk lebih jelas lagi tentang tingkat pendidikan di Kecamatan Merbau dapat dilihat pada table II.3 sebagai berikut:

Tabel II.3

Kualifikasi Penduduk Kecamatan Merbau Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	5946	18,4%
2	Tidak sekolah	5321	16,43%
3	TK	956	2,95%
4	SD	9680	29,9%
5	SLTP	4200	12,97%
6	SLTA	3506	10,83%
7	Perguruan Tinggi	2760	8,52%
Jumlah		32.369	100%

Sumber data: *Monografi Kecamatan Merbau tahun 2011*

Dari tabel diatas dapat diketahui yang tergolong berpendidikan dikecamatan merbau lebih kurang 20.146 orang dan jumlah penduduk yang belum menamatkan pendidikan yaitu sebesar 2% dan yang belum sekolah masih cukup besar yaitu sekitar 5.946 orang atau sekitar 18,4% dan yang tidak sekolah yaitu 5.321 orang sekitar 16,43%. Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintah telah mengadakan dan mendirikan

sarana dan prasarana pendidikan, untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Merbau dapat dilihat pada tabel II.4 dibawah ini:

Tabel II.4
Prasarana Pendidikan Umum (Negeri) Kecamatan Merbau

No	Prasarana	Jumlah
1	TK	8
2	SD	41
3	SLTP	8
4	SLTA	3

Sumber Data: *Monografi Kecamatan Merbau tahun 2011*

Dari tabel diatas diatas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas umum yang ada di Kecamatan Merbau terdapat 8 unit taman kanak-kanak 41 unit sekolah dasar, 8 unit SLTP dan 3 unit SLTA. Disamping pendidikan umum, terdapat pula sekolah pendidikan agama yaitu, 7 unit MDA, 5 unit MTS serta 4 unit MA.

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada dikecamatan merbau ini, banyaknya sarana pendidikan yang belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ketingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan perasarana yang ada maka sebagian besar anak yang lulus sekolah menengah atas melanjutkan pendidikannya ketempat lain atau kota lain, seperti kota Pekanbaru, Medan, Padang,Bengkalis dan lain-lain.

4. Sosil Budaya

Penduduk Kecamatan Merbau terdiri dari bermacam suku antara lain:

1. Suku melayu
2. Suku jawa

3. Suku bugis
4. Suku banjar
5. Suku akit (suku pedalaman)
6. Keturunan cina

Penduduk kecamatan merbau mayoritasnya adalah suku melayu dan disamping itu adalah suku jawa dan suku-suku lainnya sebagian kecil saja termasuk juga keturunan cina (tiong hoa). Dengan pertumbuhan penduduk pada umumnya lamban dan relatif rendah yaitu 2,26% / tahun.¹⁰

B. Profil Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri 01

1. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera 01 Di Kecamatan Merbau

LKM Mandiri Sejahtera 01 adalah sebuah usaha yang didirikan di Kecamatan Merbau dan telah diakui secara sah dan legal dengan terdaftarnya LKM ini di kantor notaries RIDHO FENDI, SH, yang berkedudukan di Bengkalis pada tanggal 27 April 2007, dan dinas koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis, tanggal 10 Juni 2008 dengan izin badan hukum Nomor: 24/ BH/IV.9/DISKOP/VI 2008. Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nama Lembaga Keuangan Mikro Mandiri Sejahtera.

LKM Mandiri Sejahtera yang berkedudukan di Jl. Kamboja No.16 Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti difasilitasi oleh Kondur Petroleum. SA. Yang mana dalam inisiasi kegiatannya. Kondur memberi kepercayaan kepada PINBUK (pusat instasi

¹⁰ Sumber data: Monografi Kecamatan Merbau 2011

usaha kecil), sebagai konsultan untuk membentuk dan membina LKM mandiri sejahtera yang didirikan di daerah operasional perusahaan (kondur petrelum.SA) sebagai salah satu program pemberdayaan dalam konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dan pada tanggal 23 mei 2011 sampai sekarang bertukar nama menjadi KJKS Mandiri Sejahtera (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera). Dan mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp.200.000.000,- dari Dinas Koperasi (Pemerintah) dan ditetapkan badan hukum sebagai berikut: “24/BH/PAD/IV.12/VI/2011.

Sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syari’ah, KJKS Mandiri Sejahtera terus berusaha tahap demi tahap untuk menetapkan prinsip-prinsip tersebut didalam setiap kegiatannya.adapun kegiatan KJKS mandiri sejahtera berdasarkan prinsip syari’ah, antara lain: “pembiayaan dan tabungan berdasarkan prinsip mudharabah, pembiayaan dengan prinsip murabahah, pembiayaan dengan prinsip qardhul hasan dan pembiayaan dengan prinsip bai’ bitsaman ajil.”

Dalam hubungan kerja sama dengan Bank Riau Bengkalis, KJKS mandiri sejahtera telah diberi kepercayaan untuk mengelola dana dari Bank Riau cabang Bengkalias tersebut agar disalurkan kepada masyarakat yang dianggap layak. Hingga saat ini KJKS mandiri sejahtera terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tampaknya usaha itu mulai terbukti dengan terpilihnya KJKS mandiri sejahtera sebagai juara dua tingkat nasional dalam bidang lembaga keuangan mikro pada “Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat” (GKPM) yang diadakan di Jakarta.

2. Visi dan Misi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri 01

Dalam rangka untuk mengarah dan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dibentuk dalam suatu visi dan misi adapun visi dan misi KJKS Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut:

1) Visi

Menjadikan lembaga fasilitator dan inkubator usaha mikro dan kecil dengan menumbuhkan dan mengembangkan jaringan kerja LKM dan POKUSMA (kelompok usaha bersama) yang mandiri.

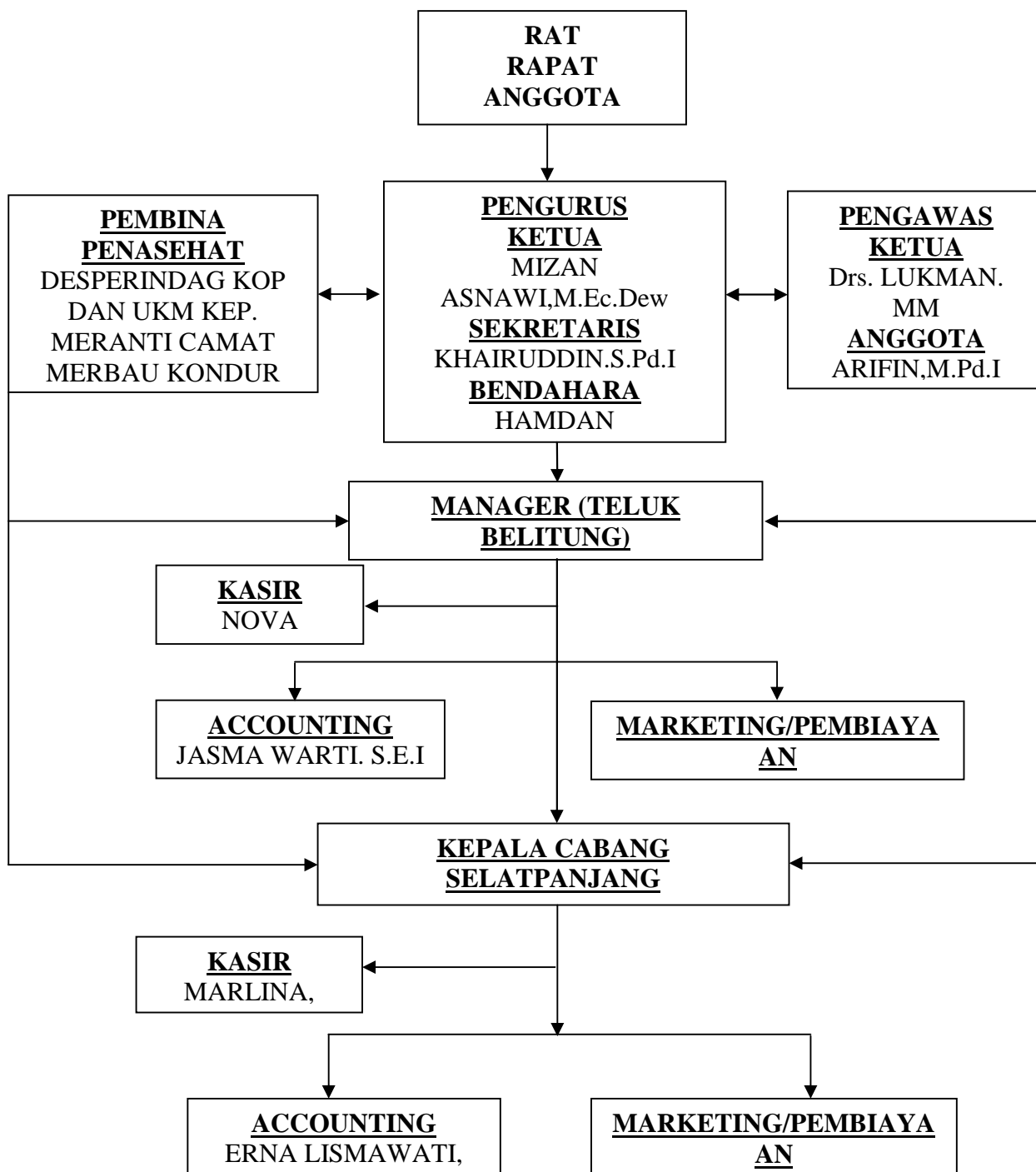
2) Misi

- a. Menumbuhkan dan memperkuat sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi mikro melalui LKM dan POKUSMA dan lembaga-lembaga pendukung pengembangannya.
- b. Mewujudkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang adil, merata dan berkelanjutan.
- c. Membangun kelembagaan sebagai wahana yang bekarya bagi para kader-kadernya sebagai motor penggerak pemberdayaan.
- d. Ikut berpartisipasi aktif dalam memajukan potensi SDA maupun SDM diwilayah Kecamatan Merbau khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti serta Provinsi Riau secara umum.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana yang memperlihatkan tingkat-tingkat jabatan serta tugas yang berbeda. Struktur organisasi KJKS Mandiri Sejahtera Priode 2011-2014 dapat dilihat dalam gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISANI
KJKS MANDIRI SEJAHTERA
PRIODE 2011-2014



4. Kondisi Keanggotaan Koperasi

Setiap orang yang masuk menjadi anggota koperasi haruslah berdasarkan pada kesadaran dan keyakinan untuk secara aktif didalam koperasi dan bertekad untuk memperbaiki kehidupannya dan masyarakat. Selain itu seseorang bebas untuk menjadi anggota koperasi dan memperoleh manfa'at-manfa'at ekonomis dan sosial menurut pertimbangan hubungan para anggota. Untuk lebih jelas akan dijelaskan kondisi kenggotaan koperasi.

5. Jenis Dagangan

Sudah menjadi ketentuan bahwa dipasar merupakan tempat berkumpulnya para konsumen dan produsen atau antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berbagai macam jenis barang dagangan mulai dari pedagang kaki lima seperti penjual sayur, bahkan pedagang asongan, sepatu, pakaian dan elektronik yang sudah memiliki toko sebagai tempat usaha.

Menurut Bapak Mizan Asnawi bahwa adanya setatus perbedaan jenis dagangan diperoleh ketika seseorang mendaftar untuk pertama kali di KJKS Mandiri Sejahtera. Sampai sa'at ini sudah banyak yang telah sukses menjadi pedagang besar. Sehingga mereka tidak lagi membutuhkan dana untuk penambahan modal, akan tetapi mereka hanya menjadi anggota penyimpan dana saja. Artinya mereka tidak lagi mengambil

simpanan yang ada kecuali ketika mereka sudah meninggal dunia dan ini biasanya dikembalikan kepada ahli waris.¹¹

a. **Pertumbuhan Anggota Tiap-tiap Priode**

Pertumbuhan dan perkembangan sebuah koperasi biasanya didominasi oleh bagaimana manajemen kepengurusan, bila manajemen pengurus baik maka pertumbuhan dan perkembangan sebuah koperasi akan jauh berkembang lebih baik.

6. Jenis-jenis Produk

KJKS Mandiri Sejahtera merupakan sebuah lembaga keuangan yang berpola syari'ah, sehingga produk-produk yang dikembangkan juga mengacu kepada fatwa dewan syari'ah dan pedoman pelaksanaan lembaga keuangan syari'ah.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, KJKS Mandiri Sejahtera mempunyai berbagai macam produk yang inovatif, baik dalam hal produk inovatif, baik dalam hal produk simpanan maupun produk pembiayaan. Adapun produk-produk yang ditawarkan KJKS Mandiri Sejahtera Mandiri kepada masyarakat yaitu:

a. **Produk Tabungan (Simpanan)**

1. TAMARA (Tabungan Mandiri Sejahtera)

Tabungan ini bagi masyarakat umum yang ingin menabung. Tabungan jenis ini bisa diambil kapan saja, sesuai hari kerja yang berlaku umum. Tabungan ini sama seperti tabungan giro

¹¹ Mizan asnawi (Ketua KJKS Mandiri Sejahtera). *Wawancara*, Teluk Belitung, Kamis 22 Maret 2012.

syari'ah pada perbankan syari'ah. Untuk saat ini belum ada bagi hasil untuk tabungan TAMARA ini, baik kepada nasabah secara individu maupun kelompok, karena dananya tidak bisa diputar.

Untuk saat ini KJKS Mandiri Sejahtera baru bisa memberikan pelayanan berupa jasa kepada para nasabah, yaitu memberikan kemudahan kepada nasabah dalam hal menabung dan menarik tabungan dan rasa aman terhadap dana yang disimpan tersebut.

2. TADIKA (Tabungan Pendidikan Anak)

Biasanya, ketika tahun ajaran baru datang, banyak pelajar yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya. Masalahnya ketiadaan dana, walaupun ada tapi dananya terbatas. Untuk mengantisipasi kesulitan yang timbul dikemudian hari tersebut, KJKS Mandiri Sejahtera hadir untuk memberikan solusi bagi pelajar-pelajar yang tidak mau berhenti menuntut ilmu, hanya dikarenakan ketiadaan biaya.

Produk yang ditawarkan KJKS ini tidak hanya memberikan solusi kepada pelajar, juga ikut membantu program pemerintah, yaitu membiasakan anak-anak menabung sejak dini.

Produk TADIKA ini di desain khusus bagi pelajar baik TK, SD, SMP maupun SMA sederajat untuk persiapan untuk biaya sekolah pada tahun ajaran baru, tabungan TADIKA ini tidak bisa diambil setiap saat, tapi hanya dapat diambil pada waktu-waktu

tertentu. Sama seperti deposito pada perbankan syari'ah. Tabungan ini ada bagi hasilnya, yang akan diberikan pada saat penarikan tabungan pada tanggal jatuh tempo.

3. TADURI (Tabungan Idul Fitri)

Jika TADIKA khusus bagi peajar, untuk persiapan pendidikan dimasa mendatang, KJKS Mandiri Sejahtera juga memberi produk TADURI, khusus bagi ibu-ibu rumah tangga, untuk membuat persiapan sedini mungkin dalam penyambutan dan memeriahkan hari raya idul fitri.

4. TADUHA (Tabungan Idul Adha)

Tabungan ini diberikan kepada orang-orang muslim yang ingin melaksanakan ibadah qurban.

5. TAWA (Tabungan Wisata)

Tabungan ini disiapkan untuk siswa SD, SMP dan SMA sederajat, khususnya kelas 6 (bagi siswa SD) dan kelas 3 (bagi siswa SMP dan SMA sederajat) yang akan mengakhiri masa pendidikannya dengan mengadakan study tour di tempat yang telah ditentukan oleh KJKS Mandiri Sejahtera . ada beberapa tempat yang disiapkan oleh pihak JKS untuk mengadakan study tour, yaitu: Malaka, Langkawi, Sumbar dan Medan.

Artinya: “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.(QS. Al-Muzzammil:20)

Al-Hadis:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا

عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِ
 بِه دَابَّةً دَاتَ كَبْدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya: “ *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Syaidina bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudaharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut . Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya.*” (HR Thabrani)¹²

2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak KJKS Mandiri Sejahtera dengan nasabah. Dalam akad murabahah, KJKS Mandiri Sejahtera menyebutkan harga pembelian barang kepada nasabah, kemudian ia akan mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

Karakteristiknya adalah, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Suatu jual beli dalam Islam sedikitnya harus memenuhi syarat bahwa ada penjual, pembeli, barang yang diperjual

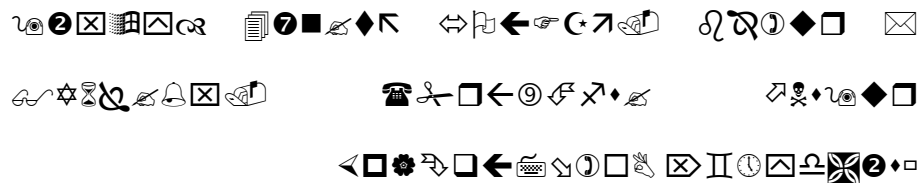
¹² Muhammad safi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Cet. ke -1, hlm. 96

belikan, harga, dan ijab qabul atau biasa disebut juga dengan akad jual beli.

Landasan Hukum:

Al-Qur'an:

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:



Artinya: *jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis.* (QS. Al-Baqarah :283)

Al-Hadis:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِاشْتَعِيرِ اللَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: *Dari Suhaib ar-Rumi ra. “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu: jual beli secara tangguh, mudharabah dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”* (HR. Ibnu Majah).

3. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil

Bai' Bitsaman Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara KJKS dengan anggotanya, dimana KJKS menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang atau modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil dan angsuran. Jumlah

kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal yang disepakati.

Dasar Hukum:

Al-Qur'an:

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:



Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. Al-Baqarah : 275).

Al-Hadis:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِاشْتَعِيرِ اللَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “*Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu: jual beli secara tangguh, mudharabah dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”. (HR. Ibnu Majah).¹³

4. Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan Qardhul Hasan adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang tidak mampu atau dalam kesusahan untuk membiayai usahanya yang dinilai produktif, dimana nasabah tidak dituntut atas bagi hasil maupun margin keuntungan, tetapi hanya harus mengembalikan pokoknya saja sebesar dana yang di pinjam.

¹³ *Ibid*, hlm 102

Al-Hadis:

Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata : “*(lainnya) dua kali, kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.*” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi).¹⁴

Adapun jenis usaha yang selama ini yang diberi pembiayaan oleh pihak KJKS-MS diantaranya adalah :

- ¹⁴ *Ibid*, hlm 132

7. Usaha nelayan
8. Usaha bengkel
9. Usaha jualan ikan



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penggunaan dana

Dalam praktiknya dana yang dimiliki oleh perusahaan, baik dan pinjaman maupun modal sendiri, dapat digunakan dua hal. *Pertama*, digunakan untuk keperluan investasi. Artinya dana ini digunakan untuk membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang yang dapat digunakan secara berulang-ulang. *Kedua*, dana digunakan untuk membiayai modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek, seperti pembelian bahan baku, dan biaya-biaya operasional lainnya.

Dana dapat diartikan dalam artian sempit dan luas, dana dalam pengertian sempit yaitu sebagai 'kas', sedangkan dana dalam arti luas adalah modal kerja.

1. Dana dalam artian sempit

- a. Menyusun laporan perubahan neraca yang dapat menggambarkan perubahan masing-masing elemen neraca dua titik waktu yang akan dianalisis (bulanan/tahunan)
- b. Mengelompokkan perubahan tersebut dalam golongan yang memperbesar kas dan memperkecil kas
- c. Mengadakan konsolidasi dari semua informasi tersebut kedalam laporan sumber-sumber dana

2. Dana dalam artian luas

Dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan modal kerja tidak tercantum di dalamnya sumber-sumber dan penggunaan danayang berasal dari unsur-unsur modal kerja

Yang merupakan penggunaan modal kerja antara lain:

- a. Bertambahnya aktiva tetap
- b. Berkurang hutang jangka panjang
- c. Pembayaran kas deviden
- d. Adanya kerugian dalam operasi perusahaan¹⁵

Setelah dana dikumpulkan oleh koperasi dana yang berasal dari anggota nya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suka rela, dan dan yang berasal dari pihak bank, maka sesuai dengan kewajibanya koperasi menyalurkan dana kepada anggotanya tersebut untuk pembiayaan, dalam hal ini harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-danayang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan, alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah,
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. (Yogyakarta : Penerbit : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII. 2004). Cet I. hlm 104

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi, alokasi dana bank syari'ah pada dasarnya dapat dibagi dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

- a. Earning Asset (aktiva yang menghasilkan)
- b. Non Earning Asset (aktiva yang tidak menghasilkan)

Adapun Asset yang disalurkan dalam bentuk investasi yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
 - b. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Murabahah*)
 - c. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*)
3. Penggalangan dana digunakan untuk:
 - a) Penyaluran melalui pembiayaan
 - b) Kas tangan
 - c) Ditabungkan di bank syari'ah
 4. Klasifikasi pembiayaan yaitu digunakan/dimanfaatkan untuk: perdagangan, industri rumah tangga, pertanian, peternakan, perikanan, percetakan atau jasa-jasa lain.
 5. Antisipasi kemacetan dalam pembiayaan yaitu:
 - a) Evaluasi terhadap kegiatan pembiayaan
 - b) Merevisi segala kegiatan pembiayaan
 - c) Pemindahan akad baru
 - d) Mencarikan donatur yang bisa menutup pembiayaan

6. Manfaat dana stabilisasi

Jika dikembangkan dana stabilisasi ini akan diperoleh beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tingkat kepercayaan anggota
- b. Adanya kepastian dan keamanan
- c. Memobilisasi dana masyarakat
- d. Koperasi merupakan instrumen dalam pemupukan modal
- e. Permudah pertimbangan dalam pembentukan koperasi

7. Persyaratan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Dana Stabilisasi

- a. Koperasi harus sehat memiliki manajeemen keuangan yang baik

Sehat dalam arti koperasi simpan pinjam sehat organisasi, sehat permodalan, dan sehat usaha, sedangkan manajemen keuangan yang baik mempunyai arti memiliki keuangan dan standar akuntansi koperasi simpan pinjam untuk pembukuan, tertib administrasi, dan memiliki kontrol keuangan yang baik.

- b. Koperasi simpan pinjam harus membangun jaringan keuangan.
- c. Rasio keuangan terjamin

Jika koperasi simpan pinjam sehat memiliki manajemen keuangan serta sistem kontrol yang baik perlu ditunjang dengan rasio keuangan yang menjamin tersedianya dana khususnya untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang mendesak.¹⁶

¹⁶ Sinaga, Pariaman, *Koperasi dalam Sorotan Peneliti*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Cet ke-1, hlm 456-457

B. Pengertian Koperasi

Dari segi etimologi kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerjasama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesabaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.¹⁷

Di Indonesia pengertian koperasi menurut undang-undang koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Perkoperasian adalah “koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Dari definisi di atas maka pengertian koperasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rakyat: yang dimaksud dengan rakyat adalah orang-orang yang kondisinya relatif lemah, yaitu perlu menghimpun tenaganya agar mampu menghadapi kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang relatif kuat.

¹⁷ Yahya Abdurrahman, *Koperasi Dalam Pandangan Syari'ah*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), Cet ke- 1, hlm. 15

2. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama di kalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. Jadi, orang tersebut bergabung dengan sukarela atas kesadaran adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi ini tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campuran tangan dari pihak lain.
3. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal.
4. Koperasi memiliki watak sosial, yaitu bahwa dasar koperasi adalah kerjasama.
5. Koperasi juga dapat beranggotakan badan-badan hukum koperasi.
6. Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya (kekeluargaan), hal ini dicerminkan berdasarkan karya dan jasa para anggota dalam kegiatan koperasi.

Dari berbagai macam definisi yang telah diuraikan di atas, jika diteliti lebih lanjut, bahwa definisi itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, definisi tersebut menekankan bagi masyarakat yang mempunyai golongan ekonomi lemah, seperti definisi yang dikemukakan oleh Dr. Fay (1908), yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan bersama yang terdiri dari mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan yang sebanding dengan pemanfaatan modal koperasi.

Menurut Bapak Marono Djojohadi Koesokma dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi 1941” mengatakan bahwa koperasi adalah “perkumpulan orang-orang dengan sesukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesukarelaan dalam koperasi
- b. Bahwa dengan bekerjasama, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
- c. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan ekonomis.¹⁸

Sedangkan menurut Sudarsono dan Edilius, koperasi adalah organisasi masyarakat atau kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau mengusahakan ekonomi para anggotanya sesuai dengan prinsip koperasi.¹⁹

¹⁸ Hendrojogi, *Koperasi, Azas, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm 22

¹⁹ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), Hlm 8

C. Prinsip, Fungsi dan Peran Koperasi

1. Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek. Sangat umum ditemukan pandangan bahwa koperasi memiliki atau harus memiliki prinsip-prinsip yang khusus yang khusus yang dapat memberi pedoman bagi kegiatan koperasi.

Dengan seiring berkembangnya prinsip koperasi yang dikemukakan, bahwa terdapat 7 prinsip koperasi modern yang pertama didirikan pada tahun 1844 oleh 28 orang pekerja a lancashite di Rochdale. Yang mana prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar gerakan koperasi internasional, yaitu:

- a) Keanggotaan terbuka
- b) Pengembalian bunga atas modal
- c) Alokasi atas SHU sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota
- d) Satu anggota satu suara
- e) Penjualan tunai
- f) Menekankan pada unsur pendidikan
- g) Netral dalam agama dan politik.²⁰

Adapun menurut Sukanto Reksohadiprodjo, prinsip-prinsip koperasi antara lain:

²⁰ Jochen Ropi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), Hlm 17

- a) Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota.
- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan.
- e) Kemandirian, kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.

Antara golongan pengusaha ekonomi dan golongan ekonomi lemah terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Semakin lebar jurang tersebut semakin sulit untuk membangun kesejahteraan rakyat secara merata dan membahayakan negara. Dalam implementasinya tujuh nilai yang menjiwai koperasi verti Hatta, dituangkan dalam prinsip operasionalnya yaitu:

- a) Meningkatkan produksi.
- b) Memperbaiki kualitas produksi.

- c) Mengefisiensikan distribusi.
- d) Memperbaiki dan mengendalikan harga.
- e) Menghapuskan pengaruh lintah darat atau ijon.
- f) Otonomi dan kebebasan.
- g) Menghimpun modal simpan pinjam dan memelihara lumbung desa.²¹

2. Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi yaitu:

- a) Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b) Alat pendemokrasian nasional.
- c) Alat pembinaan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bahasa Indonesia serta bersatu dalam tata perekonomian rakyat.
- d) Sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia.

Dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan dan peran yang penting bersama-sama dengan BUMN atau swasta melakukan berbagai usaha demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

3. Peran Koperasi

- a) Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha.
- b) Koperasi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

²¹ *Op Cit*, Hlm 88

- c) Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta, dan daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya.
- d) Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia.
- e) Koperasi berperan aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi Indonesia.²²

D. Landasan dan Azas Koperasi

1. Landasan Koperasi

Untuk mendirikan koperasi perlu adanya landasan tertentu yang merupakan suatu dasar tempat berpijaknya yang memungkinkan koperasi untuk berkembang dan berdiri kokoh untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.

Di Indonesia koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti sehingga landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat, perlu diketahui bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat dibandingkan dengan perubahan pemikiran dan alam. Sehingga koperasi dalam kenyataannya belum berkembang sesuai dengan yang diinginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.

Landasan-landasan koperasi dapat dibagi atas tiga, yaitu:

- a. Landasan idiil

²² Karta Sapoeutra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003). Hlm

Landasan idiil merupakan landasan atau dasar yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang-orang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota gerakan koperasi sebagai organisasi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, jadi tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia.

b. Landasan Struktural

Landasan struktural adalah tempat berpijak koperasi dalam hidup bermasyarakat di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup moral cita-cita suatu bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah salah satu bagian yang terpenting adalah kehidupan ekonomi yaitu segala kegiatan dan usaha untuk mengatur dan mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup.

c. Landasan Mental Koperasi

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran pribadi. Rasa setia telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu dan merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Sifat ini tercermin dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku yang nyata sebagai kegiatan gotong royong, tetapi landasan-landasan setia kawan saja

hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis bukan dinamis dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan.²³

2. Azas Koperasi

Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Azas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, dan juga menganut tata kehidupan yang berazaskan kekeluargaan dan bekerjasama saling bantu membantu. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan dan tempat lingkungan serta suasana waktu sepanjang masa, dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan gotongroyong dan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa azas koperasi meliputi:

- a. Azas kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk bekerjasama dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.
- b. Azas kegotongroyongan, yang berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerjasama, rasa bertanggungjawab

²³ Jochen Ropi, *OpCit.* Hlm 8

bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.²⁴

E. Persyaratan Pembentukan Koperasi dan Jenis Koperasi

Persyaratan Pembentukan Koperasi. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu dalam Pasal 6 sampai 8 disebutkan persyaratan untuk pembentukan koperasi yaitu:

1. Persyaratan pembentukan koperasi berdasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk apakah koperasi primer atau koperasi sekunder.
2. Untuk persyaratan pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Untuk persyaratan pembentukan koperasi sekunder memerlukan minimal 3 koperasi yang berbadan hukum.
3. Koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Untuk pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dana.
5. Anggaran dasar koperasi harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a) Daftar nama pendiri
 - b) Nama dan tempat kedudukan
 - c) Maksud dan tujuan serta bidang usaha
 - d) Ketentuan mengenai keanggotaan
 - e) Ketentuan mengenai rapat anggota
 - f) Ketentuan mengenai pengelolaan

²⁴ *Ibid*, Hlm 17-18

- g) Ketentuan mengenai permodalan
- h) Ketentuan mengenai jangka waktu pendirian
- i) Ketentuan mengenai pembagian SHU
- j) Ketentuan mengenai sanksi.²⁵

F. Jenis Koperasi

Sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi. Jenis-jenis ini adalah koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi. Perkembangan koperasi mula-mula hanya terbatas pada tiga bidang usaha tersebut, lama-kelamaan bertambah luas sesuai dengan keperluan masyarakat. Seperti koperasi pertanian, peternakan, perikanan, dan lainnya. Dasar penjenisan koperasi Indonesia ini adalah kebutuhan dari dan maksud untuk efisiensi golongan dalam masyarakat yang mempunyai kesamaan aktifitas dan kepentingan ekonominya. Secara garis besar jenis koperasi dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi didirikan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dalam hal penyediaan sandang dan pangan, tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Untuk

²⁵ Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2002), Hlm 193.

melayani kebutuhan anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut, yaitu:

- a) Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
- b) Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak.
- c) Berusaha membuat barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.

2. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam)

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan.

Tujuan koperasi ini adalah:

- a) Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dana dengan syarat yang ringan.
- b) Mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- c) Mendidik anggota hidup hemat dengan menyerahkan sebagian dari pendapatan mereka.

3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang yang menjadi anggota koperasi. Anggota koperasi produksi terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang dan jasa, orang-orang tersebut adalah

buruh dan pengusaha kecil. Oleh sebab itu kita mengenal 2 macam koperasi, yaitu:

- a) Koperasi produksi buruh yang anggotanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai usaha sendiri.
- b) Koperasi produksi produsen yang anggotanya orang-orang yang masing-masing mempunyai usaha sendiri.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah yang berusaha di bidang penyediaan jasa bagi para anggotanya maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi perencanaan, dan konstruksi bangunan, koperasi jasa audit, koperasi asuransi Indonesia, dan koperasi jasa untuk menturus dokumen-dokumen seperti SIM, STNK, Paspor, Sertifikat Tanah dan lain-lain.

5. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi unit desa (KUD). Satu unit desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi ini dianjurkan untuk membentuk KUD yang menjadi anggota koperasi unit desa adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan wilayah kerja KUD. Karena kebutuhan mereka beraneka ragam, maka KUD sebagai pusat

pelayanan dalam kegiatan perkoperasian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsinya antara lain:

- a) Perkreditan yaitu untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja atau usaha bagi anggota KUD.
- b) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana untuk keperluan industri dari para anggota KUD.
- c) Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdangan, dan pengangkutan.
- d) Dalam melaksanakan tugasnya, KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

G. Koperasi dalam Pandangan Islam

Munculnya koperasi syariah bisa dikatakan sebagai koreksi yang ada selama ini yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan Kasindo (Koperasi Syariah Indonesia), koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan yang ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Perkembangan koperasi Indonesia saat ini sudah mulai diwarnai dengan perkembangan koperasi dengan sistem syariah. Koperasi dengan sistem syariah menggunakan asas kebersamaan dan keadilan. Koperasi syariah menjadi unit usaha yang berprespektif, karena unit usaha ini memiliki

manfaat ganda, yaitu dari pengelolaan koperasi syariah bagi para anggota dan pengelolaannya.²⁶

Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “*cooperation*” (Inggris) yaitu kerjasama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab. Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam.²⁷

Menurut Muhammad Syaiful, koperasi merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.

Landasan Hukum koperasi (Syirkah ta’awuniah) adalah:

1. Al-Qur’an

Surat Shaad : 24



Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh”.

²⁶ Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 38

²⁷ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari’ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Cet ke 1, hlm 193.

2. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَفَعَهُ - : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.
()

Artinya : “Dari Abi Hurairoh ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman : “ Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang berserikat salah seorang diantaranya tiada yang mengkhianat yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang diantara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya,” (HR. Abu Daud).²⁸

Maksudnya adalah Bahwa Allah memberkati dua sekutu dalam urusan harta dan Dia menjaga mereka selama salah seorang mereka tidak berkhianat, Jika berkhianat, berkah akan dicabut.

Koperasi dalam Islam dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Syirkah ‘inan

Syirkah ‘inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

2. Syirkah Mufadhah

Syirkah mudadhah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Permodalan harus sama banyaknya
- b. Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum.

²⁸ Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Mukhtasar Nailul Authar*, (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2006), Hlm 162

c. Satu agama, sesama muslim

d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah.

3. Syirkah Wujud

Syirkah wujud yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka dengan syarat yang ditentukan.

4. Syirkah Abdan

Syirkah abdan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian, yang telah disepakati sebelumnya.²⁹

H. Pengertian Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan menurut syari'ah

Pembiayaan berdasarkan syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁰

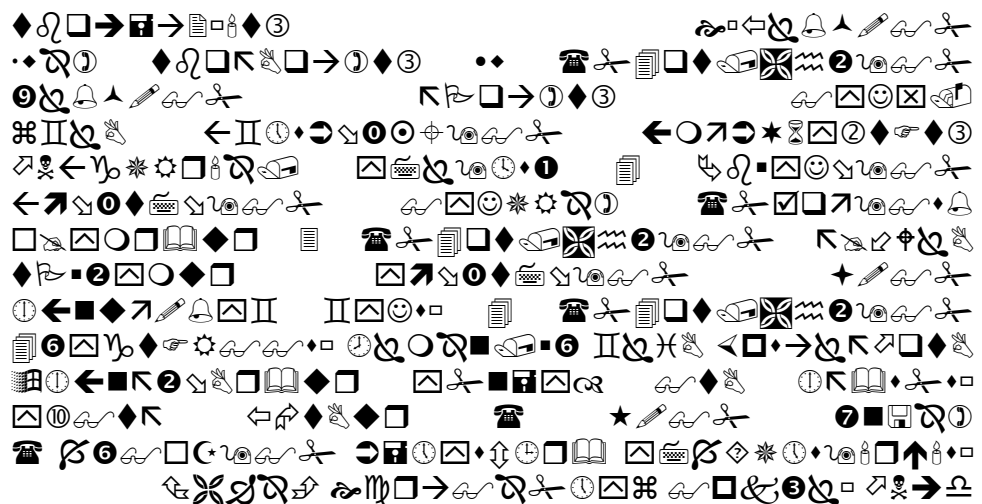
Pembiayaan secara luas berarti financing yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, sedangkan dalam arti sempit

²⁹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2006), Cet ke- 2, Hlm 188.

³⁰ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet ke-2 hlm. 10

pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

Jika Bank memberikan pinjaman (dalam pengertian komersil) kepada nasabah untuk membeli barang-barang itu, Bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu. Sebagai lembaga yang mengharapkan keuntungan, Bank syari'ah tetap tidak mungkin melakukannya karena itu harus dilakukan jual beli dimana Bank syari'ah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual keuntungan beli dalam islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah:275



Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni

*neraka; mereka kekal di dalamnya.*³¹

Islam mengajarkan kredit dengan istilah pembiayaan didalam ajaran Islam pula kredit tidaklah dilarang baik yang bersifat konsumtif dan produktif bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan itu tidak ada aturannya yang di ajarkan oleh Islam.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan menurut syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu atas dasar persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembangkan uang atau tagihan tersebut jangka waktu tertentu dengan imbalan (bagi hasil) kepada yang memberi pembiayaan.

1. Pembiayaan menurut konvensional

Pembiayaan merupakan penyediaan atau penyaluran dana oleh pihak-pihak yang kekurangan dana atau peminjam dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

I. Jenis-jenis pembiayaan

1. Pembiayaan Menurut Tujuannya

- Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya di nikmati oleh pemohon.

³¹ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet ke- 1 hlm.

- Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang dan jasa.
 - Pembiayaan Perdagangan, pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya
- Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
 - Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun.
3. Pembiayaan dilihat dari penggunaannya
- Pembiayaan Modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha.
 - Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang modal.
 - Pembiayaan Multi Guna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan anak, pembelian aneka peralatan rumah tangga, dan sebagainya.³²

J. Unsur- unsur Pembiayaan

1. Kepercayaan

³² Yusak laksmana, *Account Office Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), cet ke- 1, hlm 22-23

Yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa akan datang.

2. Kesepakatan

Dalam unsur pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang mengakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaannya maka mengakibatkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet.

5. Balas jasa

Yang merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan atau jasa yang dikenal dengan bagi hasil.

Adapun unsur menurut pandangan Syariah yaitu antara lain:

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati maksudnya adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan perbuatan yang

tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada bagi masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut.

2. Terjadinya perjanjian saling ridho, dalam hal ini tidak ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut.

K. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian criteria, serta aspek penilainnya tetap sama, begitu pula dengan ukuran-ukuran yang sudah menjadi standar penilaian setiap bank biasanya karena penilaian yang harus dilakukan oleh bank biasanya untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dengan analisis 5C dan 7P. adapun penjelasan 5C tersebut adalah sebagai berikut:

1. Character

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada koperasi bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercemin dari latar belakang nasabah, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga. Character merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar pembiayaannya. Orang yang karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. Capacity (Cabability)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit atau pembiayaan dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta

kemampuan mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3. *Capital*

Biasanya tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha seratus persen, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai.

4. *Chollecteral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus teliti keabsahannya, sehingga terjadi sesuatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Chondition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sector masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun juga diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Sedangkan penilaian dengan 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan berbeda nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan–golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya koperasi yang rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk

pengembalian kredit yang akan diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar uaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.



BAB IV

DANA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH MANDIRI

SEJAHTERA DAN PENINGKATAN USAHA PEDAGANG DI

KECAMATAN MERBAU

**A. Pemanfaatan Dana Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera
Oleh Pedagang di Kecamatan Merbau**

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera dalam melakukan kegiatan operasionalnya, menghimpun dana dari para anggotanya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Akan tetapi ada juga sebagian dana pinjaman berasal dari hubungan kerja sama antara pihak Bank, dan pada akhirnya dana tersebut dimasukkan kedalam kas koperasi, dan selanjutnya bagi para anggotanya yang membutuhkan dana dapat meminjam kepada KJKS mandiri sejahtera.

Dalam peningkatan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat, pihak jasa keuangan syari'ah mandiri sejahtera memberikan pinjaman sebelum dana tersebut dipinjamkan oleh anggota koperasi, maka pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera memberikan persyaratan kepada anggota yang akan meminjam sejumlah dana tersebut.

Bagi para anggota koperasi jasa keuangan syariah mandiri sejahtera yang hendak meminjam dana, maka harus mengajukan permohonan dalam bentuk proposal, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Blangko permohonan kredit yang terdiri dari tujuan penggunaan dana pinjaman tersebut.
2. Foto copy kartu keluarga
3. Foto copy KTP suami istri yang masih berlaku.
4. Pas foto suami istri
5. Surat tanah dan jaminan yang lainnya.³³

Adapun persyaratan yang lain yaitu:

1. Bersedia menjadi anggota KJKS Mandiri Sejahtera
2. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
3. Bersedia dikunjungi lokasi anjungan dan tempat usaha serta lokasi tempat tinggal, dan
4. Bersedia mengisi form analisa usaha dan memberikan data keuangan secara jujur dan benar.

Setelah permohonan pembiayaan diseleksi oleh pihak koperasi, kemudian data-data di validasi oleh petugas KJKS-MS, dianalisa, disurvei lokasi usaha dan tempat tinggal. Selanjutnya hasil dianalisa oleh petugas dan akan dimusyawarah ke tingkat pengelola dengan menganalisa 5C yaitu *character* (Watak dan Kepribadian nasabah), *capacity* (Kemampuan Nasabah), *capital* (Modal), *collateral* (Jaminan Pembiayaan), dan *condition* (

³³ Susilo, *Siasat Sukses Kredit Bank*, (Yogyakarta: Pinus, 2007), cet. Ke- 2 hlm .16

Keadaan Ekonomi Usaha), maka apabila permohonan pembiayaan disetujui maka akan dilakukan akad pembiayaan. Adapun besar kredit pembiayaan yang diberikan pihak KJKS-MS kepada nasabah yaitu untuk kebutuhan konsumtif berkisar Rp 5.000.000.00;-10.000.000.00, sedangkan untuk kebutuhan produktif berkisar Rp 10.000.000'.-20.000.000'. dengan perjanjian pelunasan kredit pembiayaan berlangsung selama jangka waktu peminjaman , sebelum dana tersebut dicairkan oleh KJKS-MS juga memberikan kesepakatan kepada pemohon kredit dengan prinsip bagi hasil yaitu keuntungan yang diperoleh oleh pihak KJKS-MS sesuai dengan kesepakatan pada awal pembiayaan. Akad yang banyak digunakan nasabah dalam pembiayaan yaitu akad mudarabah dan akad murabahah.

Untuk mengetahui kenapa para pedagang tersebut mengajukan pembiayaan/ kredit pinjaman kepada KJKS-MS, dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut ini.

Tabel IV.5
Tanggapan Responden Mengenai Faktor Yang Mendorong Mengajukan
Pembiayaan Ke KJKS-MS

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mudah Mendapatkan Dana	32	60.38%
2	Terhindar Riba	15	28.3%
3	Angsuran Kecil	6	11.32%
	Jumlah	53	100

Sumber Data: Olahan Angket No 1

Tabel IV.5 menjelaskan bahwa kenapa alasan masyarakat yang menjadi anggota KJKS-MS berkeinginan mendapatkan pembiayaan atau kredit dari KJKS-MS, adalah karena KJKS-MS memberikan pelayanan yang

cepat dan mudah dalam proses mendapatkan penbiayaan/kredit, hal ini terbukti dari jawaban responden sebanyak 32 yaitu (60.38%) menjawab karena alasan tersebut. Sedangkan 15 responden (28.3%) yang mendapatkan pembiayaan dari KJKS-MS karena faktor ideologis (agama) yaitu terhindar dari riba, dan 11.32% responden yang beralasan bahwa karena angsuran kecil, maka mereka menggunakan dana KJKS-MS untuk mendapatkan pembiayaan dalam rangka memajukan usaha mereka.

Menurut ketua koperasi, sebagai masyarakat yang menggunakan dana pinjaman rata-rata sudah mempunyai modal, akan tetapi modal tersebut masih kurang untuk melanjutkan usaha, maka untuk menambah modal usaha banyak anggota pedagang yang mengajukan permohonan pembiayaan agar modalnya bisa bertambah sehingga usaha mereka menjadi lebih besar.³⁴

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang perolehan dana pinjaman, maka dapat dilihat pada table IV.6 berikut:

Tabel IV.6
Tanggapan Responden Mengenai Apakah Seluruh Modal Bersumber Dari
KJKS-MS

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	30	56.6%
2	Sebagian	13	24.5%
3	Tidak	10	18.9%
	Jumlah	53	100

Sumber Data: Olahan Angket No 2

Adapun responden yang menyatakan sumber modal berasal dari KJKS-MS adalah 30 responden atau sebesar (56.6%). Yang menyatakan

³⁴ Mizan asnawi,(Ketua KJKS-MS), *Wawancara*, Teluk Belitung, Senin 08 Oktober 2012

sebagian modal bersumber dari pembiayaan dari KJKS-MS adalah 13 responden atau sebesar (24.5%), dan yang menyatakan modal tidak bersumber dari KJKS-MS adalah 10 responden atau sebesar (18.9%).

Responden yang menyatakan seluruh modal berasal dari KJKS-MS dikarenakan para responden tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga mereka meminjamkan dana tersebut untuk modal usaha. Sedangkan responden yang menyatakan seluruh modal tidak bersumber dari koperasi dan hanya sebagian saja bersumber dari koperasi dikarenakan para responden sudah memiliki modal, sehingga mereka hanya meminjam dana tersebut untuk menambah modal usaha yang sedang berjalan agar tidak bangkrut.³⁵

Untuk mengetahui usaha yang ditekuni setelah mendapat pembiayaan maka dapat dilihat pada table IV.7 berikut ini:

Tabel IV.7
Tanggapan Responden Mengenai Usaha Yang Ditekuni Setelah Mendapat
Pembiayaan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Dagang keperluan harian	32	60%
2	Jualan keliling	13	25%
3	Jualan/bisnis dengan menetap ditoko	8	15%
	Jumlah	53	100

Sumber Data; Olahan Angket No 3

Dari tabel diatas tersebut dapat kita ketahui bahwa kebanyakan sektor usaha yang mendapat pembiayaan dari Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera kebanyakan dimanfaatkan oleh para pedagang yang menjual

³⁵ Hamdan,(Anggota KJKS-MS), *wawancara*, Teluk Belitung, Senin 8 Oktober 2012

keperluan sehari-hari yaitu sebanyak 32 responden (60%), sedangkan nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera yang berprofesi sebagai pedagang yang berjualan keliling sebanyak 13 responden (25%), dan pedagang yang menetap disatu toko masing-masing ada 8 responden (15%).

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang prosedur pembiayaan KJKS-MS dapat dilihat pada tabel IV.8 sebagai berikut:

Tabel IV.8
Prosedur Pembiayaan Pada KJKS-MS

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sulit	11	20.8%
2	Tidak Sulit	30	56.6%
3	Biasa Saja	12	22.6%
	Jumlah	53	100

Sumber Data: Olahan Angket No 4

Dari tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa 11 responden menyatakan sulit dalam prosedur pembiayaan pada KJKS-MS, dan 30 responden (56.6%) yang menyatakan tidak sulit dalam prosedur pembiayaan pada KJKS-MS, sedangkan 12 responden (22.6%) menyatakan biasa saja dalam prosedur pembiayaan pada KJKS-MS.

Responden yang menyatakan sulit dalam mengajukan permohonan pembiayaan tidak melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh KJKS-MS. Dan responden yang menyatakan tidak sulit dan biasa saja karena mereka melengkapi syarat-sarat dan permohonan pembiayaan sebanding dengan jaminan yang mereka berikan.

Menurut Burhanuddin, manajer KJKS-MS mengatakan, bahwa bagi nasabah baru yang meminjam dana diberikan diminta untuk melengkapi

persyaratan yang diminta oleh pihak koperasi, gunanya untuk mengetahui keadaan nasabah yang mau diberikan dana dan untuk menghindari kredit macet, tetapi bagi nasabah yang sudah pernah meminjam yang telah lunas hutangnya dan mereka meminjam lagi, maka mereka akan diberikan kemudahan untuk melakukan pembiayaan, karena pihak koperasi telah mengetahui keadaan nasabah dan usaha yang ditekuni.³⁶

Untuk mengetahui bagaimana alasan responden dengan memanfaatkan dana pembiayaan tersebut, dalam hal ini dapat kita lihat dari tabel IV.9 sebagai berikut:

Tabel IV.9
Tanggapan Responden Mengenai tentang pemanfaatan dana pembiayaan dari
KJKS-MS

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Untuk kebutuhan sehari-hari/ konsumtif	19	36%
2	Untuk menambah modal yang ada	26	49%
3	Untuk modal usaha pertama	8	15%
	Jumlah	53	100

Sumber Data: Olahan Angket No.5

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa sebanyak 19 responden (36%) menyatakan bahwa dana yang berasal dari koperasi digunakan untuk kebutuhan konsumtif, dan sebanyak 26 responden (49%) menyatakan bahwa dana yang didapat dari koperasi digunakan untuk menambah modal usaha yang sudah ada, yaitu usaha produktif, sedangkan 8 responden (15%) menyatakan bahwa dana yang berasal dari koperasi digunakan untuk kebutuhan modal usaha pertama.

³⁶ Burhanuddin, (Manajer KJKS-MS), *Wawancara*, Teluk Belitung, Selasa 9 Oktober 2012

Menurut sekretaris KJKS-MS Khairudin,³⁷ menyatakan bahwa sebelum meminjam dana pada KJKS-MS masih merasa kekurangan modal usaha sehingga bisa mengurangi tingkat kesejahteraan mereka.

Untuk mengetahui apakah keuntungan/bagi hasil yang diambil KJKS-MS memberatkan, dapat kita lihat pada table IV.10 sebagai berikut:

Tabel IV.10
Tanggapan Responden Tentang Keuntungan / Bagi Hasil Yang Diambil
KJKS-MS

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	3	5,7%
2	Tidak	50	94,3%
3	Tidak tahu	-	-
	Jumlah	53	100

Sumber Data: Olahan Angket No 6

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan keuntungan /bagi hasil yang diambil KJKS-MS memberatkan adalah 3 responden atau sebesar (5,7%), yang menyatakan tidak memberatkan adalah 50 responden atau sebesar (94,3%).

Responden yang menyatakan bahwa keuntungan/bagi hasil yang diambil KJKS-MS memberatkan dikarenakan bahwa keuntungan yang mereka peroleh dari usahanya tidak seberapa, sedangkan responden yang menyatakan bahwa keuntungan bagi hasil yang diambil KJKS-MS tidak memberatkan karena mereka mendapat keuntungan yang besar dari usahanya.

³⁷ Khairuddin, (Sekretaris KJKS-MS), *Wawancara*. Teluk Belitung, Selasa 9 Oktober 2012

Untuk mengetahui bagaimana system pembayaran dana pembiayaan yang dikeluarkan oleh peminjam maka dapat kita lihat pada tabel IV.11 sebagai berikut.

Tabel IV.11
Sistem Pembayaran Dana Pembiayaan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Cicilan Perhari	41	77.4%
2	Cicilan Perminggu	9	16.9%
3	Cicilan Perbulan	3	5.7%
	Jumlah	53	100

Suber Data: Olahan Angket No 7

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa 41 responden (74.4%) menyatakan setuju pengembalian dana pinjaman dengan cicilan perhari, karena pembayaran perhari lebih kecil apabila dibandingkan dengan pembayaran perminggu atau perbulan, dan 9 responden (16.9%) menyatakan setuju dengan pembiayaan dana pinjaman cicilan perminggu, dan 3 responden (5.7%) setuju dengan pengembalian dana pinjaman dengan cicilan perbulannya.

Menurut salah seorang responden, ibu Asmah lebih suka pembayaran cicilan dipungut setiap hari, Karena ibu asmah berjualan barang harian. Kalau pembayaran dilakukan perminggu atau perbulan merasa keberatan karena jumlah cicilannya besar, kalau cicilannya dilakukan harian jelas cicilannya lebih kecil dan ringan sehingga pembayarannya tetap lancar.³⁸

Menurut khairuddin, sekretaris KJKS-MS bahwa nasabah dalam membayarkan cicilan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan koperasi, yaitu

³⁸ Asmah, (Anggota KJKS-MS), *Wawancara*, Teluk Belitung, Selasa 9 Oktober 2012

cicilan perhari, perminggu dan perbulan, itu semua tergantung pada keinginan nasabah, yang penting mereka tidak merasakan keberatan dalam membayarkan cicilan dan menghindar terjadinya kredit macet.³⁹

Dapat kita simpulkan bahwa bentuk penggunaan dana pembiayaan pada KJKS-MS adalah:

- a. Untuk mengetahui kebutuhan konsumtif, responden yang menyatakan dana yang berasal dari KJKS-MS digunakan untuk kebutuhan konsumtif karena dana tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan konsumtif tersebut meliputi kebutuhan harian seperti, perbaiki rumah, dan biaya pembayaran uang sekolah anak.
- b. Untuk usaha perdagangan (produktif), responden yang menyatakan dana yang berasal dari KJKS-MS untuk usaha perdagangan seperti kios, toko, kedai, atau warung, mereka hanya melanjutkan usaha yang sudah ada.
- c. Untuk modal usaha pertama, responden yang menyatakan dana yang berasal dari KJKS-MS digunakan untuk modal usaha pertama karena masyarakat benar-benar tidak mempunyai modal untuk membuka usaha yang dijalani.
- d. Untuk menambah modal yang ada, responden yang menyatakan dana yang ada untuk menambah modal usaha yang ada karena sebelumnya masyarakat meminjam dana pada KJKS-MS mereka sudah mempunyai usaha dan dana yang didapatkan dari KJKS-MS hanya untuk menambah

³⁹ Khairudin, (Sekretaris KJKS-MS), *Wawancara*, Teluk Belitung, Selasa 9 Oktober 2012

modal usaha yang dijalani agar usaha mereka berjalan dan tidak mengalami kerugian.

B. Bagaimana Hasil Pemanfaatan Dana KJKS-MS Dalam Meningkatkan Usaha Pedagang

Dalam menjalankan sebuah usaha diperlukan suatu pengawasan, pengawasan disini berguna untuk menunjang hasil usahanya apakah akan menjadi lebih baik atau malah menurun seperti sebelumnya. Dengan mengadakan pengawasan dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dana yang dipergunakan dan atau apabila terjadinya penyimpangan akan segera diketahui oleh pihak koperasi.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang kegiatan pengawasan yang dilakukan KJKS-MS, dapat kita lihat pada table IV.12 sebagai berikut:

Tabel IV.12

Tanggapan Responden Mengenai Apakah Ada Pengawasan Dari Pihak KJKS-MS Terhadap Biaya Yang Diberikan Untuk Usaha

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya Ada	16	30%
2	Tidak Ada	21	40%
3	Kadang-kadang	16	30%
	Jumlah	53	100

Sumber Data: Olahan Angket No 8

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa sebanyak 16 responden (30%) menyatakan bahwa pihak KJKS-MS melakukan pengawasan usaha terhadap pembiayaan, begitu juga yang menjawab kadang-kadang. Sedangkan 21 responden (40%) yang menyatakan tidak ada pihak KJKS-MS yang

mengecek usaha yang telah dibiayai. Responden yang menyatakan tidak ada pengawasan dari pihak koperasi karena mereka sudah lama menjadi anggota koperasi dan memanfaatkan dana dari KJKSMS, karena selama mereka meminjam dana tersebut tidak ada kredit macet dan usaha mereka lancar-lancar saja sehingga pihak koperasi sudah percaya dan yakin dengan anggota tersebut. Sehingga tidak perlu lagi ada pengawasan.

Menurut salah seorang anggota koperasi, bapak Hasan mengatakan, sangat perlu sekali dengan adanya pengawasan dari pihak KJKS-MS yang melakukan pengawasan secara sistematis dan berkala. Untuk melihat langsung proses peningkatan usaha para pembiayaan agar usaha mereka dapat berjalan dengan lancar, sehingga dengan pemanfa'atan dana tersebut betul-betul dapat meningkatkan hasil usaha pedagang.⁴⁰

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden mengenai perlukah adanya bimbingan/ pelatihan, dari KJKS-MS dapat dilihat pada tabel IV.13 sebagai berikut:

Tabel IV.13
Tanggapan Responden Perlu Adanya Bimbingan / Pelatihan Untuk Para Pembiayaan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Perlu	28	52.8%
2	Perlu	14	26.4%
3	Tidak Perlu	11	20.8%
	Jumlah	53	100

Sumber Data: Olahan Angket No 9

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 28 responden (52.8%) menyatakan sangat perlu adanya bimbingan/pelatihan dari pihak KJKS-MS,

⁴⁰ Hasan, (Anggota KJKS-MS), *Wawancara*, Teluk Belitung, Rabu, 10 Oktober 2012

dan 14 responden (26.4%) menyatakan perlu dengan adanya pelatihan/bimbingan dari pihak KJKS-MS, dan sedangkan 11 responden (20.8%) menyatakan tidak perlu dengan adanya bimbingan atau pelatihan dari pihak KJKS-MS.

Responden yang menyatakan sangat perlu dengan adanya bimbingan/pelatihan dari pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera karena peminjam baru pertama kali membuka usaha, dengan memanfaatkan dana dari Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera. Sedangkan responden yang menyatakan tidak perlu, karena sudah lama mereka menjalankan profesi sebagai pedagang, serta usaha tersebut sudah berjalan lama. Sehingga mereka tidak perlu lagi bimbingan/pelatihan dari pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera.

Untuk mengetahui bagaimana bagaimana tanggapan responden mengenai omset berkembang setelah mendapat pembiayaan dapat dilihat pada tabel IV.14 berikut:

Tabel IV.14
Tanggapan Responden Mengenai Apakah Omset Berkembang Setelah Mendapatkan Pembiayaan.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya	51	96%
2	Tidak	2	4%
3	Kurang	-	-
	Jumlah	53	100

Sumber Data: Olahan Angket No 10

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 51 responden (96%) menyatakan bahwa omset mereka berkembang, sedangkan 2 responden (4%)

menyatakan bahwa omset tidak berkembang. Responden yang menyatakan bahwa omset mereka berkembang setelah mendapatkan pembiayaan dari KJKS-MS dikarenakan mereka dengan giat menjalani usahanya, walaupun terjadi kerugian, karena menurut mereka untung dan rugi itu hal biasa dalam sebuah usaha, apalagi dalam berdagang.

Untuk mengetahui bagaimana jumlah pelanggan setelah pembiayaan, sebagaimana dijelaskan table IV.15 sebagai berikut:

Tabel IV.15

Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Pelanggan Setelah Pembiayaan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Meningkat	35	60%
2	Tidak Meningkatkan	11	20.8%
3	Biasa-biasa Saja	7	13.2%
	Jumlah	53	100

Sumber Data: Olahan Data No 11

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa ada 35 responden (60%) menyatakan jumlah pelanggan meningkat, sedangkan 11 responden (20.8%) menyatakan bahwa jumlah pelanggan tidak meningkat dan sebanyak 7 responden menyatakan jumlah pelanggan biasa-biasa saja.

Responden yang menyatakan jumlah pelanggannya meningkat setelah pembiayaan dikarenakan barang dagangannya itu bermacam-macam serta terpenuhi kebutuhan masyarakat, dan harganya juga terjangkau oleh masyarakat, sedangkan responden yang menyatakan tidak meningkat karena barang dagangannya serba kekurangan dan harganya terlalu mahal. Hal ini dikarenakan dana yang didapat dari peminjaman pada Kopersai Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera dipergunakan untuk keperluan lain.

Untuk mengetahui bagaimana pendapatan setelah mendapat pembiayaan dapat kita lihat dari tabel IV.16 berikut:

Tabel IV.16

Tanggapan Responden Mengenai Pendapatan Setelah Mendapatkan Pinjaman

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat meningkat	45	84,9%
2	Biasa saja	5	9.4%
3	Tidak meningkat	3	5.7%
	Jumlah	53	100

Sumber Data: Olahan Angket No 12

Dari data diatas dapat kita lihat, sebanyak 45 responden (84.9%) menyatakan pendapatan meningkat sejak diberikan pinjaman oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera, sedangkan 5 responden (9.4%) menyatakan pendapatan menurun dan sebanyak 3 responden (5.7%) menyatakan pendapatan biasa saja.

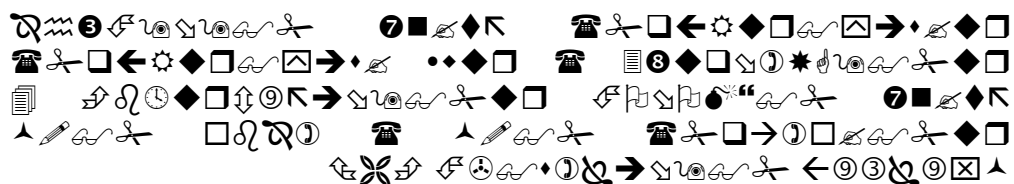
Mereka yang menyatakan bahwa pendapatan menjadi lebih meningkat dikarenakan dana pinjaman tersebut memang dipergunakan untuk menambah modal dan disertai keahlian mereka dalam mengelola keuangan. Sedangkan responden yang menyatakan pendapatan biasa-biasa saja, karena dana yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk menambah modal usaha. Akan tetapi sebagian dana yang didapat dari Koperasi Jsasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membayar uang sekolah anak, dan membeli prabot rumah tangga.⁴¹

⁴¹ Umi Kalsum, (Anggota KJKS-MS), *Wawancara*, Teluk Belitung, Kamis, 11 Oktober 2012.

C. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Dana Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera (KJKS-MS)ingkatkan Dalam Meningkatkan Usaha Pedagang

Dana pinjaman merupakan dana yang berasal dari simpanan anggota yang terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela, serta dana yang berasal dari kerja sama antara pihak bank dengan pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera yang kemudian dana tersebut oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera disalurkan kepada anggota yang membutuhkan dana, koperasi memberikan pinjaman kepada anggota yang kekurangan modal untuk menjalankan usaha, anggota yang mendapatkan pinjaman akan memanfa'atkan dana pinjaman untuk menambahkan modal usaha, dana yang diterima peminjam mereka memanfa'atkan untuk menambah modal usaha. Usaha yang banyak dibiayai seperti Pedagang Pakaian, Barang Harian, Obat-obatan dan Kosmetik, Pedagang Sepatu dan Pedagang Kaki lima.

Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dilarang berbuat kejahatan, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:



Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*⁴²

Dari ayat diatas kita ketahui bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera telah menjalankan apa yang dianjurkan dalam ayat diatas.

Ada juga sebagian mereka memanfa’atkan dana pinjaman Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera tidak sesuai dengan pemahaman yang diajukan dan akad perjanjian dengan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera, sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Karena dana yang mereka pinjam tidak dimanfa’atkan untuk menambah modal usaha. Hal tersebut dikarenakan keterpaksaan seperti digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membayar uang sekolah anak, dan untuk keperluan lainnya.

Sebelum dana tersebut diberikan kepada peminjam dan mereka yang memanfaatkan, anggota yang mau meminjam harus melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Kopersai Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera, berupa surat permohonan pembiayaan, yang dilengkapi dengan beberapa syarat seperti KTP, KK, Pas Foto, dan dokumen atau sertifikat yang bernilai seperti surat tanah.

Setelah syarat-syarat tersebut dilengkapi, kemudian pihak koperasi melihat kelengkapan syarat-syarat yang diajukan oleh peminjam apakah permohonan diterima atau ditolak, setelah syarat-syarat diseleksi oleh pihak

⁴² Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Lagesindo, 2007), Hlm 85.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera. Anggota yang layak untuk meminjam maka akan ditindak lanjuti dan diproses oleh petugas seperti pemanggilan calon nasabah, bagi yang berkeluarga suami istri harus hadir, bagi yang lajang orang tua bersangkutan harus hadir, untuk menandatangani perjanjian pembiayaan dan pembacaan akad dan serah terima, setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan selesai, maka anggota boleh membawa uang yang sesuai dengan permohonan yang diajukan kepada pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera.

Dalam Islam kita dianjurkan apabila melakukan transaksi utang piutang maka harus ditulis dan ada jaminannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah Ayat 283 yang berbunyi:

[illegible]

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴³

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa setiap transaksi harus dicatat dan ada jaminannya, jaminan tersebut harus mempunyai harga dan dapat

⁴³ *Ibid*, hlm 71

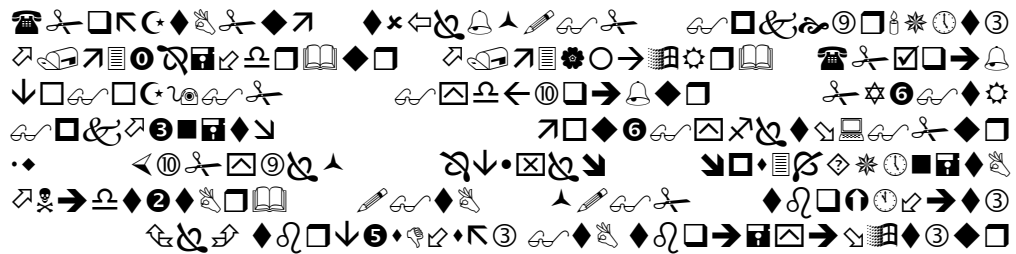
diuangkan. Jaminan untuk mengantisipasi apabila si peminjam tidak sanggup untuk membayar hutang, maka ada jaminan yang dijadikan sebagai ganti dari hutangnya tersebut. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera memberikan dana kepada nasabah yang kekurangan dana, dana yang diberikan dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif, seperti menambah modal usaha. Hal ini dibolehkan dalam Islam, karena akan membuka lapangan pekerjaan dan dapat mengurangi pengangguran, dalam Islam kita dianjurkan untuk berdo'a dan berusaha, Islam tidak membatasi umatnya untuk menjalankan usaha apapun, selama usaha tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

Artinya: *apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁴⁴

Selain untuk menambah modal, dana pinjaman Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera dimanfa'atkan nasabah untuk kebutuhan konsumtif seperti seperti kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, dan lain-lain. Dalam Islam membelanjakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga adalah suatu kewajiban bagi seorang pemimpin atau kepala keluarga. Hal ini bertujuan agar terjaga kelangsungan hidup dan tercipta

⁴⁴ *Ibid*, hlm 933

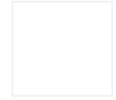
generasi yang berguna bagi agama dan bangsa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁴⁵

Ayat diatas dapat diketahui bahwa kita diperintahkan untuk memelihara keluarga seperti memberi mereka nafkah dan pendidikan supaya mereka menjadi generasi yang berilmu sehingga berguna bagi agama, masyarakat bahkan Negara.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 951



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pemanfaatan dana Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera oleh pedagang diKecamatan Merbau sudah begitu berdampak positif Karena masyarakat atau anggota Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera menggunakan dana pembiayaan untuk usaha produktif sesuai dengan akad yang diajukan dalam pembiayaan. Akan tetapi ada juga sebagian masyarakat memanfa'atkan dana pembiayaan dari Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif yaitu kebutuhan sehari-hari.
2. Hasil pemanfaatan dana Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera dalam meningkatkan usaha pedagang sudah mengalami peningkatan, karena setiap anggota yang dibiayai dilakukan pengawasan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera serta bimbingan dan pelatihan terhadap usaha yang dijalani, agar dana pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan produktif dan tepat guna.

3. Tinjauan Islam terhadap pemanfaatan dana Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera oleh nasabah sudah sesuai dengan syari'at Islam, karena Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera dengan menerapkan prinsip bagi hasil.

84

B. Saran

1. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera hendaknya lebih meningkatkan kegiatan bimbingan serta pelatihan kepada peminjam/nasabah.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera hendaknya menyalurkan kepada peminjam yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh peminjam.
3. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Sejahtera hendaknya lebih giat dalam melakukan pengawasan terhadap usaha yang dibiayai.
4. Untuk para nasabah atau anggota sebaiknya dana yang didapat dari Syari'ah Koperasi Jasa Keuangan Mandiri Sejahtera dapat digunakan secara maksimal mungkin untuk meningkatkan usaha yang dijalankan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Sitio,M.sc, *Koperasi Teori dan Praktek*,Jakarta: PT.Glora Aksara Pratama,2001
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sinar Baru Lagesindo,2007
- Drs. Subandi, *Ekonomi Koperasi*, Bandung: CV. Alfa Beta,2010
- G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,2007
- Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2002
- Hendrojogi,M.sc, *Koperasi Azas-azas Teori dan Praktek*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002
- Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Mukthasar Nailul Authar*, Jakarta: Buku Islam Rahmatan,2006
- Inggrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syari'ah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,2009
- Jochen Ropi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Karta sapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers,2011
- Muhammad,*Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*,Yogyakarta:UII Press,2000
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2007
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII,2004
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, 2001
- Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006



Sosilo, *Siasat Sukses Kredit Bank*, Yogyakarta: Pinus, 2007

Sinaga, Pariaman, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008

Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005

Undang-undang Perbankan No. 10, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Yahya Abdurrahman, *Koperasi dalam Pandangan Syari'ah*, Bogor: Al-Azhar Perss 2011

Yusak Laksamana, *Account Office Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Elex Media Kompotindo, 2009